JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 0000 - 0000
Vol. 1, No. 1, 2024

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TELUK MESJID KECAMATAN DANAU PANGGANG

Amni [1], Munawarah [2], Nida Urahmah [3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail : amni21921@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat untuk masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan menurut BPS. Program ini meliputi pendidikan, kesehatan, disabilitas, lansia, dan kesejahteraan sosial. Di Desa Teluk Mesjid, terdapat beberapa masalah seperti banyaknya keluarga yang menerima bantuan dari desa, kurangnya validasi data penerima bantuan, dan kurang pemahaman mengenai PKH oleh penerima manfaat (KPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di Desa Teluk Mesjid. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi PKH kurang baik, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tujuan PKH dan penggunaan dana yang tidak tepat. Namun, program ini telah membantu masyarakat dalam meringankan beban keuangan mereka. Untuk meningkatkan pelaksanaan program, disarankan agar kepala desa dan aparat desa lebih memperhatikan keterlibatan KPM dalam rapat, dan KPM Teluk Mesjid harus lebih sadar dalam menggunakan dana PKH sesuai dengan tujuan program.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Keluarga Harapan, Kecamatan Danau Panggang

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a conditional cash transfer program for people who meet poverty criteria according to BPS. This program includes education, health, disability, the elderly, and social welfare. In Teluk Mesjid Village, there are several problems such as the number of families receiving assistance from the village, lack of validation of beneficiary data, and lack of understanding of PKH by beneficiaries (KPM). This study aims to evaluate the implementation of PKH in Teluk Mesjid Village. The research methods used are interviews, observation, and documentation. The results showed that the evaluation of PKH was not good, as seen from the fact that there are still many people who do not know the purpose of PKH and the improper use of funds. However, this program has helped the community in easing their financial burden. To improve program implementation, it is recommended that village heads and village officials pay more attention to the involvement of KPM in meetings, and KPM Teluk Mesjid should be more aware in using PKH funds in accordance with program objectives.

Keywords : *Evaluation, Family Hope Program, Danau Panggang District*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia saat ini terdiri dari 17. 508 pulau, sekitar 6000 diantaranya dihuni, terbagi menjadi 34 provinsi, lima dianatranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 304 kabupaten dan 98 kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia, dan 742 bahasa dan dialek yang berbeda BPS, 2010. Dengan populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi dimasyarakat seperti kemacetan, kemiskinan dan lain-lain. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan bahwa Negara bekewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

memajukan kesejahteraan social dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesi. Banyak sekali penduduk Indomnesia saat ini yang masih hidup dalam keadaan miskin dan bahkan sangat miski, yang membuat mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Keniskinan itu merupakan sebuah konsep yang amat relatif sehingga amat sulit dedifinisikan. Itulah sebabnya kebanyakan dari mereka tidak berani menuliskan definisi kemiskinan itu secara eksplisit. Meskipun demikian, sekalipun amat umum, beberapa diantara mereka menuliskan juga definisi kemiskinan itu. Program Keluarga Hrapan PKH adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga sangat miskin RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash tranfers cct atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan misalnya bagi anak usia sekolah, ataupun kehdiran fasilitas kesehatan misalnya bagi anak blita, atau bagi ibu hamil. Program Keluarga Harapan yang lawas, atau pada tahun 2014 sehingga msih menggunakan MDGS, belum memakai standar SDGs, dahulu memang PKH adalah program perlindungan sosial angang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin RTSM dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generas, sehinga gnerasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kecamatan ini memiliki banyak keluarga miskin, seperti yang terlihat dari data PKH di Desa Teluk Mesjid. Pada tahun 2020, terdapat 59 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tahun 2021 meningkat menjadi 70 KPM, dan tahun 2022 tetap 70 KPM. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kelompok masyarakat miskin di Kecamatan Danau Panggang. Namun, masih ada masalah dalam pelaksanaan program ini, seperti adanya KPM yang mampu tetap menerima bantuan PKH setelah melahirkan atau setelah anaknya lulus sekolah. Selain itu, data KPM penerima bantuan PKH belum divalidasi dengan baik, dan ada ketidakpahaman KPM tentang PKH serta kurangnya evaluasi yang mendalam, menyeluruh, dan rutin.

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Yulius Tandigoa pada tahun 2016 di Universitas Hasanudin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sesen Padang Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan empat indikator implementasi yaitu sumber daya, al disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program yang menyebabkan ketidaklaksanaan program sesuai pedoman dan pemotongan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Kendala dalam pelaksanaan program antara lain kurangnya koordinasi antar tugas pelaksana dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Faktor pendukung adalah rutinnya petugas PKH dalam membagikan bantuan (Tandigoa, 2016). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rani Isnani pada tahun 2018 bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tiga indikator evaluasi yaitu efektivitas, pemerataan, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang diberikan oleh PKH kepada penerima manfaat belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan ketegasan pendamping kepada penerima PKH. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pola perilaku dan kualitas kehidupan penerima manfaat program (Isnani, 2018).

Evaluasi adalah penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui asesmen. Data ini digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan pengukuran menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Ada beberapa definisi evaluasi menurut para ahli. Menurut Arikunto dan Jabar, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang digunakan untuk menentukan alternatif dalam pengambilan keputusan (Arikunto, 2010). Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat tentang objek evaluasi (Wirawan, 2012). Hamzah B. Uno dan Satna Koni mencatat bahwa evaluasi adalah proses memberikan makna atau kualitas hasil pengukuran dengan membandingkannya dengan kriteria tertentu. Darodjat dan M. Wahyudhiana mendefinisikan evaluasi sebagai perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar/kriteria. Mohrens menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi untuk menetapkan alternatif. Arikunto juga berpendapat bahwa evaluasi adalah proses menentukan hasil dari kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Evaluasi dilakukan dalam konteks siklus pemantauan, evaluasi, dan review, dan digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pencapaian kegiatan. Evaluasi dilakukan setelah kebijakan sudah berjalan cukup waktu untuk mengetahui hasilnya, terutama untuk kebijakan strategis. Namun, untuk kebijakan teknis, evaluasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat setelah implementasi. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk menilai dan membandingkan tingkat pencapaian kerja suatu objek. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan.

Menurut Muhadjir, evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk menilai apakah suatu kebijakan publik bisa menghasilkan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Menurut Anderson, evaluasi kebijakan publik melibatkan estimasi atau penilaian tentang substansi, implementasi, dan dampak kebijakan. Winarno, menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah langkah terakhir dalam proses kebijakan publik yang melibatkan semua tahapan, mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang diharapkan.

Arikunto (2013:36) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja suatu hal yang digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan. Menurut Beni Setiawan,evaluasi program terdiri dari empat indikator yaitu indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator dampak. Sedangkan William N Duun (Anggara, 2016) menyatakan bahwa evaluasi dipengaruhi oleh enam subvariabel yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai dengan persyaratan bagi RTSM yang memenuhi kriteria kemiskinan menurut BPS. PKH mencakup pendidikan, kesehatan, disabilitas, lansia, dan kesejahteraan sosial. Tujuan PKH Pendidikan adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak RTSM dan mengurangi pekerja anak. Tujuan PKH Kesehatan adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terutama yang miskin. UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten/Kota, dan Pendamping PKH bertanggung jawab dalam kesuksesan program ini.

METODE

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan penarikan secara *purposive* dengan berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data mengunakan perpanjangan pengamatan. (Sugiyono, 2016)

PEMBAHASAN

Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Danau Panggang

Efektivitas

Efektivitas kebijakan tergantung pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan kebijakan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Namun, jika tujuan tidak tercapai, maka dapat disimpulkan terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi kemiskinan. Namun, berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, tujuan ini belum tercapai dengan baik. Beberapa masyarakat masih kurang mengetahui dan memahami tujuan PKH, serta masih ada keluarga penerima manfaat yang tidak menggunakan bantuan secara tepat, seperti menggunakan uang PKH untuk orang tua yang bukan anggota keluarga penerima manfaat dan tidak sesuai dengan prosedur PKH. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan PKH di Desa Teluk Mesjid belum tercapai dengan baik. Pencapaian tujuan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Efesiensi

Efisiensi berkaitan dengan usaha yang diperlukan untuk mencapai efektivitas tertentu. Biasanya dihitung melalui perhitungan biaya. Upaya pemerintah desa untuk mencapai Program Keluarga Harapan (PKH) yang memuaskan masyarakat dilakukan dengan baik melalui musyawarah dengan Penerima Keluarga Manfaat (PKM). Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melayani PKH dengan baik. observasi juga menunjukkan upaya pemerintah desa yang baik. Pemanfaatan dana harus diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan pemanfaatan dana masih belum baik karena kurangnya pemahaman dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan pemanfaatan dana untuk keluarga miskin.

Kecukupan

Kebijakan dikatakan memenuhi kriteria kecukupan jika output yang dihasilkan dapat efektif mengatasi masalah sebelum implementasi kebijakan. Output merupakan hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan atau perencanaan. Dalam program Keluarga Harapan, output yang dihasilkan belum memadai karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang malas bekerja karena mereka mengandalkan bantuan dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat terkait program tersebut.

Pemerataan

Kebijakan pemerataan publik dapat dilihat dari kesetaraan fasilitas bagi warga, apakah sudah merata atau masih sama seperti sebelumnya, serta siapa saja yang mendapatkan fasilitas tersebut. Distribusi yang tepat dan sesuai dari Program Keluarga Harapan penting untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai sasaran, seperti bantuan dana yang diperlukan oleh desa. Namun, hasil

wawancara menunjukkan bahwa distribusi program ini masih belum baik di desa, karena keluarga miskin yang cukup banyak tidak mendapatkan bantuan PKH dengan tepat. Ini disebabkan oleh penggunaan data lama yang masih digunakan, sehingga banyak keluarga miskin dan keluarga yang memenuhi kriteria PKH yang belum menerima bantuan. Jangkauan dan sasaran program juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa program ini efektif. Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa jangkauan dan sasaran dari program PKH ini belum tepat, karena penerima PKH tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perpindahan desa, penerimaan bantuan tanpa mengikuti prosedur, dan penerimaan bantuan oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria PKH.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik diartikan sebagai tanggapan terhadap kegiatan atau kebijakan yang dinilai dari respon masyarakatnya. Kepuasaan adalah penilaian dari masyarakat setempat terhadap program Keluarga Harapan yang memberikan manfaat dan hasil yang baik. Hasil wawancara menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap program ini sudah baik, karena program tersebut telah membantu mereka. Observasi juga menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa masyarakat merasa terbantu dengan adanya program bantuan dari pemerintah desa. Pengembangan program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan fasilitas pelayanan yang mudah diakses. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengembangan program ini sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Program ini juga membantu keuangan dan kebutuhan anak-anak keluarga penerima manfaat.

Ketepatan

Pemilihan alternatif rekomendasi didasarkan pada ketepatan yang menilai apakah hasil alternatif tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Bantuan Pemerintah Desa dinilai berdasarkan manfaat hasil yang diberikan kepada masyarakat setempat. Wawancara menyimpulkan bahwa masyarakat merasakan manfaat yang baik dari program yang dijalankan oleh pemerintah desa, termasuk bantuan PKH yang membuat KPM cukup puas. Hasil observasi juga mengindikasikan bahwa manfaat hasil yang dirasakan oleh masyarakat di desa tersebut sangat positif dan sangat bermanfaat bagi KPM. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat membantu KPM. Dalam hasil wawancara dan observasi, terlihat bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Teluk Mesjid sudah baik dan bantuan PKH sangat membantu Penerima Keluarga Manfaat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Keluarga Harapan Desa TeluK Mesjid Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara

Adapun fakto-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan evaluasi program Keluarga Harapan (PKH) Ini adalah Kurangnya validasi data KPM masih menggunakan data lama dan ketidak merataan dalam bantuan tersebut, Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam pertemuan rapat tentang program keluarga harapan.

SIMPULAN

Program Keluarga Harapan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dievaluasi. Dalam evaluasi ini, ditemukan bahwa dari 11 indikator yang ada, 5 indikator telah berjalan dengan baik, sementara 6 indikator belum berjalan dengan baik. *Pertama*, pada variabel efektivitas, tujuan program belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai prosedur PKH. Beberapa masyarakat masih kurang mengetahui tujuan PKH dan belum terlihat penurunan angka kemiskinan. Selain itu, pencapaian tujuan masih kurang baik karena tidak semua

Penerima Keluarga Manfaat menggunakan dana PKH dengan benar, beberapa di antaranya menggunakan dana tersebut untuk orang tua mereka meskipun orang tua tersebut tidak termasuk dalam satu kartu keluarga. *Kedua*, pada variabel efisiensi, upaya untuk mencapai output program telah berjalan dengan baik, namun pemanfaatan dana PKH masih belum optimal. Beberapa Penerima Keluarga Manfaat masih belum memahami tujuan sebenarnya dari PKH, yang mengakibatkan penyimpangan penggunaan dana. *Ketiga*, pada variabel kecukupan, output yang dihasilkan oleh program belum berjalan dengan baik. Tidak terlihat perubahan yang signifikan dalam masyarakat selama beberapa tahun terakhir. Beberapa anggota masyarakat menjadi malas bekerja karena merasa sudah dibantu oleh pemerintah melalui PKH. *Keempat*, pada variabel pemerataan, distribusi dan cakupan program masih belum baik. Data yang digunakan masih lama, sehingga banyak keluarga yang belum mendapatkan bantuan meskipun sebenarnya mereka memenuhi kriteria PKH. *Kelima*, pada variabel responsivitas, kepuasan masyarakat dan pengembangan program telah berjalan dengan baik. Bantuan PKH ini memberikan bantuan finansial kepada Keluarga Penerima Manfaat, yang membantu meringankan beban keuangan mereka. Terakhir, fakto-faktor yang mempengaruhi kegiatan evaluasi program PKH ini adalah kurangnya validasi data Keluarga Penerima Manfaat yang masih menggunakan data lama, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pertemuan rapat mengenai program Keluarga Harapan.

Untuk tercapainya pelaksanaan program PKH maka disarankan untuk kepala Desa dan aparat desa agar lebih memperhatikan KPM agar selalu berhadir dalam rapat, pihak pengelola PKH, koordinator kecamatan dan pendamping PKH mengarahkan agar mengetahui tujuan PKH, dan KPM Teluk Mesjid diperlukan kesadaran untuk menggunakan dana PKH sesuai dengan tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Anggara, S. (2016) *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Arikunto, S. (2010) *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Askara.

Isnani, R. (2018) *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tandigoa, Y. (2016) *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKI) d Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa*. Universitas Hasanuddin.

Wirawan (2012) *Evaluasi:Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.